

## **Program MCU Gratis Belum Mampu Akomodir Seluruh Warga**

**BONTANG** - Program *Medical Check Up* (MCU) gratis yang digagas Pemerintah Pusat belum mampu mengakomodir seluruh masyarakat Kota Bontang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahtiar Mabe, saat dikonfirmasi oleh Koran Kaltim, Rabu (15/1) lalu.

Menurut Bahtiar, program tersebut hanya mencakup 36 persen dari total penduduk Bontang yakni sebanyak 68.388 orang. Sementara itu, masih ada 121.580 warga yang belum mendapatkan fasilitas MCU gratis.

"Nah, bagaimana dengan yang sisanya, terus nanti kriteria penerima juga bagaimana. Itu yang kami masih bingung. Kalau untuk menjalankan, kani siap saja," ujar Bahtiar.

Saat ini, Dinas Kesehatan Bontang masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait solusi untuk warga yang belum terakomodasi. Dua opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kemungkinan tambahan kuota dari Pemerintah Pusat.

Jika pembiayaan untuk 121 ribu warga tersebut harus ditanggung Pemkot Bontang, kebutuhan anggaran diperkirakan sangat besar. Berdasarkan harga termurah paket MCU di RSUD Taman Husada sebesar Rp537 ribu per orang, total dana yang diperlukan mencapai Rp65 miliar.

"Anggaran yang dibutuhkan sangat besar kalau harus dibebankan ke Pemkot Bontang. Bisa dihitung sendiri," pungkas Bahtiar. **(ra/si/ts)**

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Program MCU Gratis Belum Mampu Akomodir Seluruh Warga, 17/01/25

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Dalam Pasal 10 UU 17/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
  - (2) Untuk menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif fisik dan/atau insentif nonfiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.